

Kritik Feminis Poskolonial terhadap Representasi Masyarakat Adat dalam Film Dokumenter Pesta Babi

1st Kardina, 2nd Dede Rohman

1st Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Fajar

2nd Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Fajar

1st kardina@unifa.ac.id

Abstract

This article analyzes the documentary film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita as a visual-political text that criticizes developmental colonialism in South Papua. Rather than treating the film solely as a medium of Indigenous advocacy, the article employs postcolonial feminist International Relations to examine how Indigenous communities are represented, whose voices are authorized to speak, and which gendered and generational experiences remain marginal within the narrative. The study uses a qualitative design and critical discourse analysis of verbal narration, visual sequences, actor construction, testimony, and the causal relations established between development, deforestation, dispossession, and everyday insecurity. The documentary constitutes the primary data, while recent journal literature, policy documents, and international standards on Indigenous rights provide contextual triangulation. The findings demonstrate that Pesta Babi effectively reverses state-centered narratives of food and energy development by foregrounding customary land, forest, local food systems, and Indigenous political agency. Nevertheless, the film still tends to construct Indigenous peoples as a relatively homogeneous collective subject and gives limited analytical space to differences of gender, generation, customary authority, and socioeconomic position. A postcolonial feminist reading therefore extends the critique of developmental colonialism to bodies, water, food provision, care work, family relations, and local ecological knowledge. The article argues that such criticism does not weaken the film's advocacy; it strengthens it by demanding more accountable, plural, and situated visual representation.

Keywords: *Indigenous peoples; International Relations; Pesta Babi; postcolonial feminism; South Papua*

Abstrak

Artikel ini menganalisis film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sebagai teks visual-politik yang mengkritik kolonialisme pembangunan di Papua Selatan. Alih-alih menempatkan film hanya sebagai media advokasi masyarakat adat, artikel ini menggunakan feminisme poskolonial Hubungan Internasional untuk menelaah bagaimana komunitas adat direpresentasikan, siapa yang memperoleh otoritas berbicara, serta pengalaman gender dan generasi apa yang masih berada di pinggir narasi. Penelitian menggunakan desain kualitatif dan analisis wacana kritis terhadap narasi verbal, sekuens visual, konstruksi aktor, testimoni,

serta hubungan sebab-akibat yang dibangun antara pembangunan, deforestasi, perampasan ruang hidup, dan ketidakamanan sehari-hari. Film menjadi data utama, sedangkan literatur jurnal mutakhir, dokumen kebijakan, dan standar internasional hak masyarakat adat digunakan untuk triangulasi konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesta Babi efektif membalik narasi pembangunan pangan dan energi yang berpusat pada negara dengan menonjolkan tanah adat, hutan, sistem pangan lokal, dan agensi politik masyarakat adat. Namun, film masih cenderung membangun masyarakat adat sebagai subjek kolektif yang relatif homogen dan belum memberi ruang analitis memadai terhadap perbedaan gender, generasi, otoritas adat, dan posisi sosial-ekonomi. Pembacaan feminis poskolonial karena itu memperluas kritik kolonialisme pembangunan hingga tubuh, air, penyediaan pangan, kerja perawatan, relasi keluarga, dan pengetahuan ekologis lokal. Artikel ini menegaskan bahwa kritik tersebut tidak melemahkan advokasi film, melainkan memperkuatnya melalui tuntutan representasi visual yang lebih akuntabel, plural, dan kontekstual.

Kata kunci: *feminisme poskolonial; Hubungan Internasional; masyarakat adat; Pesta Babi; Papua Selatan*

A. Pendahuluan

Film dokumenter penting dalam produksi pengetahuan publik karena tidak hanya merekam, tetapi memilih dan menghubungkan realitas melalui gambar, suara, testimoni, dan struktur narasi. Dalam isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan pembangunan, dokumenter kerap menjadi media advokasi bagi suara yang tidak dominan dalam kebijakan formal. Namun, karena film juga membentuk representasi, ia perlu dibaca sebagai teks politik. Dalam HI kontemporer, visual bukan sekadar ilustrasi, melainkan praktik yang menentukan apa yang terlihat, siapa yang dikenali sebagai korban atau aktor, dan bagaimana kedekatan moral terhadap krisis dibentuk (Austin & Bramsen, 2024; Jauhola & Kunz, 2026).

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan salah satu dokumenter advokasi yang menyoroti Papua Selatan. Film ini menampilkan konflik ruang hidup masyarakat adat dalam kaitannya dengan proyek pangan, energi, deforestasi, korporasi, negara, aparat, dan perubahan ekologis. Dengan memakai istilah kolonialisme, film tersebut menghubungkan pembangunan kontemporer dengan sejarah panjang penguasaan tanah, ekstraksi sumber daya, serta peminggiran komunitas lokal. Papua Selatan dalam film tidak hadir sebagai lokasi administratif semata, tetapi sebagai ruang politik tempat pembangunan, keamanan, pangan, lingkungan, dan identitas diperebutkan. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale

tersebut diperlakukan dalam artikel ini sebagai artefak advokasi sekaligus sumber pengetahuan politik yang perlu dibaca secara reflektif (Laksono & Dale, 2026).

Artikel ini menempatkan Pesta Babi sebagai objek kajian Hubungan Internasional kritis. Isu yang diangkat film tidak dapat dibaca hanya sebagai persoalan domestik Indonesia. Proyek pangan dan energi, deforestasi, hak masyarakat adat, tata kelola sumber daya alam, keamanan manusia, serta advokasi lingkungan merupakan isu-isu yang telah lama menjadi perhatian dalam Hubungan Internasional kontemporer. Dalam konteks ini, film dokumenter berfungsi sebagai teks visual-politik yang memproduksi cara tertentu untuk melihat negara, korporasi, masyarakat adat, dan pembangunan. Karena itu, analisis terhadap film tidak berada di luar kajian Hubungan Internasional, melainkan menjadi bagian dari upaya membaca bagaimana politik global dibentuk melalui representasi.

Konteks ke-Hubungan Internasional-an artikel ini terletak pada pertemuan antara keamanan manusia, ekonomi politik pembangunan, hak masyarakat adat, politik lingkungan, dan visual politics. Pembangunan pangan dan energi di Papua Selatan berkaitan dengan wacana swasembada, krisis pangan, bioenergi, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Agenda tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak pernah menjadi proses teknokratis yang netral. Ia bekerja melalui relasi kuasa antara negara, modal, wilayah pinggiran, dan komunitas lokal. Dalam tradisi HI kritis, relasi semacam ini dapat dibaca sebagai bagian dari ekonomi politik internasional dan keamanan nontradisional.

Pembangunan di Tanah Papua berlangsung melalui perubahan penggunaan lahan, perluasan infrastruktur, dan tata kelola sumber daya yang berdampak pada hak serta keberlanjutan ekologis masyarakat adat. Koridor Trans-Papua dapat meningkatkan tekanan terhadap hutan dan tanah adat apabila konektivitas tidak diimbangi perencanaan konservasi dan pengakuan hak (Sloan et al., 2019; Parsch et al., 2022). Insentif politik-ekonomi juga berkaitan dengan kehilangan hutan, sedangkan ekspansi perkebunan di Papua berhubungan dengan ketimpangan akses air bersih (Cisneros et al., 2021; Asmara & Randhir, 2025). Karena itu, ruang hidup perlu dibaca sebagai jaringan tanah, pangan, air, kesehatan, relasi sosial, dan pengetahuan.

Namun, pembacaan kritis terhadap pembangunan belum cukup apabila masyarakat adat hanya diposisikan sebagai korban kolektif. Di sinilah feminisme poskolonial menjadi penting.

Feminisme poskolonial tidak hanya menambahkan perempuan ke dalam analisis, tetapi mengkritik cara konsep besar seperti negara, keamanan, pembangunan, kolonialisme, dan ekonomi politik sering dibangun dari pengalaman maskulin dan elitis. Dalam kajian feminis Hubungan Internasional, politik global tidak hanya berlangsung di ruang diplomasi, perang, pasar, atau kebijakan negara. Politik global juga hadir dalam tubuh, pangan, air, kerja perawatan, keluarga, migrasi, militerisasi, dan kehidupan sehari-hari (Prügl & Tickner, 2018).

Poskolonialisme menambahkan kritik terhadap cara pengetahuan dominan memproduksi wilayah pinggiran sebagai ruang kekurangan, krisis, atau korban. Spivak (1988) mengingatkan bahwa subaltern dapat tampak dibicarakan, tetapi belum tentu berbicara sebagai subjek yang memiliki otoritas atas makna pengalamannya sendiri. Literatur dekolonial mutakhir juga menunjukkan bahwa produksi pengetahuan tetap dibentuk oleh ketimpangan epistemik, lokasi institusional, dan kecenderungan menggeneralisasi pengalaman kelompok yang berbeda-beda (Vlase, 2025). Kritik tersebut relevan bagi pembacaan *Pesta Babi* karena keberpihakan kepada masyarakat adat tetap perlu disertai pemeriksaan atas cara film memilih suara, tubuh, ruang, dan pengalaman yang dianggap mewakili komunitas.

Pembacaan awal terhadap *Pesta Babi* telah berkembang melalui beberapa jalur kritis. Aji (2026) menggunakan konsep subaltern Spivak dan homo sacer Agamben untuk menempatkan masyarakat adat Papua sebagai kelompok yang dimarginalkan oleh legitimasi kekuasaan dan narasi pembangunan; tanah dipahami sebagai ruang eksistensial, bukan sekadar aset ekonomi. Rindrasari (2026) memakai perspektif keadilan gender untuk menunjukkan bahwa perampasan ruang hidup berdampak pada perempuan dan anak melalui hilangnya sumber pangan, meningkatnya kerja perawatan, gangguan air, serta terputusnya pewarisan pengetahuan ekologis. Kedua tulisan tersebut penting untuk menjelaskan subalternitas dan dampak pembangunan yang tidak netral gender. Namun, keduanya terutama menggunakan film sebagai jalan masuk untuk membaca kondisi masyarakat adat. Masih diperlukan analisis yang memusatkan perhatian pada film sebagai praktik representasi: bagaimana kamera, penyuntingan, pemilihan narasumber, dan struktur narasi mengatur otoritas bicara serta membentuk masyarakat adat sebagai subjek kolektif. Celah penelitian inilah yang diisi artikel ini melalui feminisme poskolonial Hubungan Internasional dengan mempertemukan politik visual, keamanan manusia, dan ekonomi politik pembangunan.

Dengan latar tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana film *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* merepresentasikan masyarakat adat Papua Selatan dalam kritik terhadap kolonialisme pembangunan, dan sejauh mana representasi tersebut memperlihatkan atau justru menyederhanakan pengalaman yang dibentuk oleh relasi gender di dalam komunitas adat? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk membantah pentingnya film sebagai media advokasi. Sebaliknya, artikel ini berangkat dari posisi bahwa film tersebut penting karena membuka isu tanah adat, deforestasi, dan pembangunan di Papua Selatan. Akan tetapi, keberpihakan advokasi tetap perlu dibaca secara kritis agar tidak mengganti dominasi pengetahuan negara dengan bentuk penyederhanaan lain.

Artikel ini berargumen bahwa *Pesta Babi* memiliki kontribusi penting sebagai dokumenter advokasi yang mengkritik kolonialisme pembangunan di Papua Selatan. Namun, dari perspektif feminis poskolonial Hubungan Internasional, film ini masih cenderung merepresentasikan masyarakat adat sebagai subjek kolektif yang belum sepenuhnya memperlihatkan keragaman pengalaman yang dibentuk oleh relasi gender. Kritik ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan advokasi masyarakat adat, melainkan untuk memperkuatnya dengan menanyakan siapa yang berbicara, siapa yang diwakili, pengalaman siapa yang ditonjolkan, dan pengalaman siapa yang masih tersisih dalam narasi besar kolonialisme pembangunan.

Kontribusi artikel ini bersifat teoritis, empiris, dan praktis. Secara teoritis, artikel ini memperjelas relevansi feminisme poskolonial dalam HI untuk membaca film dokumenter sebagai praktik representasi politik. Secara empiris, artikel ini menawarkan pembacaan terhadap *Pesta Babi* sebagai teks yang menghubungkan isu Papua Selatan dengan keamanan manusia, ekonomi politik pangan-energi, dan hak masyarakat adat. Secara praktis, artikel ini menunjukkan bahwa advokasi visual tentang masyarakat adat perlu lebih sensitif terhadap keragaman suara, gender, generasi, dan posisi sosial di dalam komunitas yang dibela.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan feminis poskolonial Hubungan Internasional. Metode kualitatif dipilih karena objek penelitian bukan hanya peristiwa sosial yang ditampilkan dalam film, tetapi cara film membentuk makna politik tentang

Papua Selatan, masyarakat adat, negara, korporasi, pembangunan, dan kolonialisme kontemporer. Pendekatan feminis poskolonial digunakan untuk membaca bagaimana relasi kuasa kolonial, pembangunan, keamanan, gender, dan representasi bekerja dalam teks visual.

Data utama penelitian adalah film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*. Film dibaca sebagai teks visual-politik, bukan sebagai cerminan realitas yang netral. Unit analisis meliputi narasi verbal, visualisasi ruang, urutan adegan, pemilihan tokoh, testimoni, relasi antara suara dan gambar, serta alur argumentasi yang menghubungkan pembangunan dengan deforestasi, kehilangan tanah adat, dan kolonialisme kontemporer. Data pendukung digunakan untuk membaca konteks, bukan untuk menggantikan film sebagai objek utama. Data pendukung meliputi dokumen kebijakan, laporan publik, statistik wilayah, standar hak masyarakat adat, dan literatur akademik tentang MIFEE, food estate, visual politics, dan feminisme poskolonial. Film ditonton secara berulang dengan pencatatan sekuens dan konteks kemunculan setiap testimoni.

Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan analisis wacana kritis dan feminisme poskolonial. Analisis wacana kritis digunakan untuk membaca bagaimana film membangun kategori korban, pelaku, penyebab masalah, dan solusi politik. Mengikuti Fairclough (1995), wacana dipahami sebagai praktik sosial yang berhubungan dengan produksi dan pemeliharaan relasi kuasa. Feminisme poskolonial kemudian digunakan untuk mempertanyakan siapa yang berbicara, siapa yang diwakili, dan pengalaman siapa yang tidak cukup muncul. Dengan demikian, analisis tidak hanya menilai apakah film berpihak kepada masyarakat adat, tetapi juga bagaimana keberpihakan tersebut diproduksi melalui pilihan visual dan naratif.

Prosedur analisis dilakukan dalam lima tahap. Pertama, peneliti menonton film secara menyeluruh untuk mengidentifikasi struktur narasi utama. Kedua, peneliti membagi film ke dalam sekuens tematik, seperti pengenalan ruang Papua Selatan, penjelasan proyek pembangunan, testimoni masyarakat adat, representasi negara dan korporasi, serta penutup advokasi. Ketiga, setiap sekuens dicatat berdasarkan aktor yang muncul, isu yang dibicarakan, visual yang dominan, dan hubungan sebab-akibat yang dibangun. Keempat, data film dikodekan ke dalam empat kategori analisis: ruang hidup yang berdimensi gender, suara dan otoritas representasi, pengalaman masyarakat adat yang dibentuk oleh relasi gender, serta kolonialisme pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, hasil pengodean ditafsirkan

melalui feminisme poskolonial HI dan dibandingkan dengan data pendukung. Konsistensi interpretasi dijaga melalui penayangan ulang, pencatatan timecode, perbandingan antarsekuens, serta pemeriksaan silang antara klaim film dan literatur pendukung. Analisis juga memperhatikan kasus negatif, yaitu bagian yang tidak sepenuhnya sesuai dengan oposisi masyarakat adat versus negara-korporasi, agar kesimpulan tidak hanya mengulang kerangka advokasi film.

Keabsahan analisis ditempatkan pada transparansi jejak interpretasi, bukan pada klaim bahwa film merepresentasikan seluruh realitas Papua Selatan. Setiap temuan ditautkan pada jenis data yang diamati—narasi, visual ruang, susunan aktor, atau absennya suara tertentu—kemudian dibandingkan dengan penelitian mutakhir mengenai hak adat, pembangunan, dan dampak sosial-ekologis. Strategi ini membantu membedakan tiga tingkat pernyataan: apa yang secara eksplisit ditampilkan film, apa yang dapat ditafsirkan dari struktur representasinya, dan apa yang hanya dapat diposisikan sebagai kemungkinan untuk diteliti lebih lanjut.

Dalam artikel ini, istilah generalisasi dipahami sebagai proses representasional ketika pengalaman lokal, aktor tertentu, atau bentuk kerentanan tertentu diperluas menjadi gambaran umum tentang keseluruhan wilayah, komunitas, atau struktur kuasa. Generalisasi berbeda dari simplifikasi. Simplifikasi merupakan penyederhanaan narasi yang lazim dalam dokumenter advokasi agar isu kompleks dapat dipahami publik. Generalisasi terjadi ketika penyederhanaan tersebut mengaburkan perbedaan internal, batas lokasi, variasi aktor, dan keragaman pengalaman sosial. Dalam kerangka feminis poskolonial, generalisasi menjadi masalah ketika masyarakat adat diposisikan sebagai kategori tunggal yang seolah memiliki pengalaman, suara, dan posisi politik yang sama.

Refleksivitas menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Peneliti tidak memosisikan diri sebagai pengamat netral yang berada di luar relasi kuasa. Artikel ini berangkat dari keberpihakan normatif terhadap hak masyarakat adat, tetapi keberpihakan tersebut tidak berarti menerima seluruh narasi film tanpa kritik. Dalam tradisi feminis, refleksivitas diperlukan agar peneliti menyadari bahwa setiap analisis memiliki posisi, batas, dan konsekuensi politik. Karena isu Papua merupakan isu yang sensitif, artikel ini menghindari penyebutan informasi personal yang dapat menambah risiko bagi komunitas terdampak. Analisis difokuskan pada representasi film, bukan pada penilaian terhadap individu yang tampil dalam film.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan film sebagai data utama. Artikel ini tidak melakukan wawancara lapangan dengan komunitas adat Papua Selatan. Karena itu, temuan artikel tidak dimaksudkan untuk mewakili pengalaman empirik seluruh masyarakat adat Papua Selatan. Artikel ini membaca cara film membentuk representasi, bukan membuktikan keseluruhan kondisi sosial di lapangan. Keterbatasan ini sekaligus menjadi alasan mengapa pembacaan feminis poskolonial diperlukan: film yang kuat secara advokasi tetap perlu dibaca sebagai teks yang selektif dan tidak sepenuhnya mampu mewakili keragaman pengalaman masyarakat adat.

Tabel 1. Operasionalisasi Kerangka Analisis

Kategori analisis	Unit data film	Indikator	Pertanyaan feminis poskolonial
Ruang hidup yang berdimensi gender	Visual hutan, sungai, sagu, kampung, tanah adat	Ruang hidup dipahami sebagai sumber pangan, identitas, dan keamanan	Apakah ruang hidup dibaca sebagai pengalaman yang berbeda bagi perempuan, laki-laki, anak, dan lansia?
Suara dan otoritas representasi	Tokoh yang berbicara, narasi voice-over, posisi kamera	Ada aktor tertentu yang diberi otoritas mewakili komunitas	Siapa yang berbicara dan siapa yang hanya hadir sebagai simbol?
Pengalaman masyarakat adat berdasarkan gender	Testimoni tentang pangan, keluarga, tubuh, kerja, kehilangan tanah	Dampak pembangunan tidak dialami secara seragam	Apakah pengalaman perempuan adat dan kelompok non-elite cukup terlihat?
Kolonialisme pembangunan sehari-hari	Narasi proyek, alat berat, konsesi, deforestasi, aparat	Pembangunan dikaitkan dengan penguasaan tanah dan perubahan hidup	Bagaimana kolonialisme bekerja melalui tubuh, pangan, air, dan kerja perawatan?

Sumber: Diolah penulis berdasarkan kerangka feminis poskolonial dan analisis wacana kritis.

C. Pembahasan dan Temuan

Pesta Babi sebagai Kritik Kolonialisme Pembangunan

Hasil pembacaan menunjukkan bahwa Pesta Babi membangun kritik utama terhadap kolonialisme pembangunan. Film menempatkan Papua Selatan sebagai ruang yang mengalami tekanan dari proyek pangan dan energi, perubahan penggunaan lahan, deforestasi, serta masuknya aktor negara dan korporasi. Kritik film tidak diarahkan pada pembangunan dalam

arti abstrak, tetapi pada pembangunan yang dipahami sebagai proses penguasaan ruang hidup masyarakat adat. Dengan demikian, kolonialisme dalam film tidak hanya merujuk pada masa lalu, melainkan pada cara kekuasaan kontemporer bekerja melalui kebijakan, investasi, infrastruktur, dan wacana kemajuan. Kritik tersebut dibangun secara konsisten melalui hubungan antara kebijakan makro dan perubahan konkret pada lanskap yang dihuni komunitas adat.

Secara visual, film membangun oposisi antara ruang hidup masyarakat adat dan ruang proyek pembangunan. Hutan, sungai, sagu, kampung, dan tanah adat ditampilkan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang memiliki nilai pangan, identitas, spiritual, dan historis. Sebaliknya, proyek pembangunan hadir melalui citra alat berat, pembukaan lahan, jalan, konsesi, dan kehadiran aparat. Oposisi visual ini efektif sebagai strategi advokasi karena membantu penonton memahami bahwa persoalan Papua Selatan bukan hanya persoalan produksi pangan, tetapi juga persoalan keberlanjutan hidup komunitas adat.

Dalam konteks Hubungan Internasional, kritik ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap ekonomi politik pembangunan. Proyek pangan dan energi tidak berdiri sendiri sebagai kebijakan nasional yang netral, tetapi terhubung dengan agenda swasembada, investasi, dan pengelolaan sumber daya. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 mengorganisasi percepatan swasembada gula dan bioetanol di Merauke melalui pembangunan perkebunan, industri pengolahan, dan infrastruktur pendukung (Republik Indonesia, 2024). Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya dan kebijakan kehutanan dapat mengalami fragmentasi kewenangan, sementara insentif ekonomi-politik berpengaruh terhadap perubahan tutupan hutan (Ekawati et al., 2019; Cisneros et al., 2021). Dalam film, agenda tersebut dibaca dari bawah, yaitu dari ruang hidup masyarakat adat yang menanggung konsekuensi perubahan tanah, hutan, dan air.

Kekuatan utama film terletak pada kemampuannya membalik sudut pandang pembangunan. Dalam wacana negara, proyek pangan dan energi sering dibahas melalui bahasa produktivitas, kebutuhan nasional, ketahanan pangan, dan investasi. *Pesta Babi* menggeser bahasa tersebut ke pertanyaan tentang tanah, hutan, pangan lokal, dan hak masyarakat adat. Pergeseran ini sejalan dengan tradisi HI kritis yang menolak pembacaan keamanan sebagai

keamanan negara semata. Keamanan pangan negara tidak dapat dilepaskan dari keamanan manusia komunitas lokal yang hidup di atas tanah yang sama.

Namun, kekuatan kritik film juga membawa risiko penyederhanaan. Ketika film membangun oposisi yang tajam antara masyarakat adat dan proyek pembangunan, kompleksitas aktor dapat berkurang. Negara cenderung hadir sebagai entitas besar yang menekan. Korporasi cenderung hadir sebagai kekuatan modal yang merusak. Masyarakat adat cenderung hadir sebagai subjek kolektif yang mempertahankan ruang hidup. Struktur oposisi ini penting untuk advokasi, tetapi dalam analisis akademik perlu dibaca lebih hati-hati agar tidak menghilangkan perbedaan internal di antara negara, korporasi, maupun masyarakat adat.

Masyarakat Adat sebagai Subjek Kolektif

Temuan kedua menunjukkan bahwa Pesta Babi merepresentasikan masyarakat adat sebagai subjek kolektif yang terdampak pembangunan. Representasi ini memiliki fungsi politis yang kuat karena masyarakat adat sering kali ditempatkan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang menentukan masa depan tanah dan ruang hidupnya. Dalam film, masyarakat adat dihadirkan sebagai pemilik memori, pengetahuan ekologis, dan hubungan historis dengan tanah. Melalui testimoni warga dan tokoh adat, film memperlihatkan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, genealogis, pangan, dan keberlanjutan komunitas.

Pembingkaian tersebut penting karena menantang cara pembangunan modern sering memisahkan tanah dari kehidupan sosial. Dalam logika proyek, tanah dapat dihitung melalui hektare, izin, nilai investasi, dan target produksi. Dalam logika masyarakat adat, tanah tidak dapat direduksi menjadi komoditas. Ia menyimpan hubungan leluhur, pengetahuan ekologis, sumber pangan, dan tatanan sosial. Dengan memperlihatkan benturan dua logika tersebut, film memberikan kontribusi penting bagi perdebatan tentang hak masyarakat adat dan keamanan manusia.

Akan tetapi, representasi masyarakat adat sebagai subjek kolektif juga perlu dikritisi. Film cenderung menampilkan masyarakat adat sebagai kelompok yang memiliki pengalaman dan posisi politik yang sama terhadap pembangunan. Dalam pembacaan feminis poskolonial, masyarakat adat tidak boleh diperlakukan sebagai identitas tunggal yang stabil dan homogen.

Komunitas adat memiliki perbedaan marga, generasi, gender, posisi adat, pengalaman ekonomi, dan akses terhadap otoritas bicara. Sebagian warga dapat menolak proyek karena melihat ancaman terhadap tanah dan pangan. Sebagian lain mungkin memiliki posisi yang lebih ambivalen karena mempertimbangkan pekerjaan, kompensasi, akses jalan, atau relasi dengan pemerintah.

Kritik ini tidak berarti menolak klaim hak masyarakat adat. Justru sebaliknya, pengakuan hak akan lebih kuat apabila dibaca bersama keragaman internal komunitas. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, sumber daya, budaya, dan partisipasi dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka (United Nations, 2007). Pengalaman pengakuan hutan adat di Indonesia juga menunjukkan bahwa dukungan organisasi, kapasitas komunitas, dan pemeliharaan kelembagaan setelah pengakuan formal merupakan unsur penting (Harada et al., 2022). Karena itu, partisipasi tidak cukup dipahami sebagai persetujuan kolektif yang abstrak; analisis harus menanyakan siapa yang hadir dalam musyawarah, siapa yang menguasai informasi, dan siapa yang menanggung dampak keputusan.

Dalam film, suara masyarakat adat memang hadir. Namun, pertanyaan feminis poskolonial tidak berhenti pada kehadiran suara. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana suara itu disusun, dipilih, diterjemahkan, dan diberi otoritas oleh film. Spivak (1988) mengingatkan bahwa subaltern dapat tetap tersubordinasi meskipun namanya disebut, karena suara mereka sering hadir melalui perantara, penyuntingan, dan bahasa politik pihak lain. Dalam konteks Pesta Babi, masyarakat adat tampil sebagai pusat advokasi, tetapi tetap perlu dibaca apakah perempuan adat, anak, lansia, warga non-elite, dan orang yang tidak memegang otoritas adat mendapat ruang yang cukup sebagai subjek politik.

Ketiadaan suara tertentu di dalam film tidak otomatis membuktikan bahwa suara tersebut sengaja dihapus. Dokumenter memiliki batas durasi, akses, keamanan, dan kebutuhan membangun alur yang dapat dipahami publik. Akan tetapi, absensi tetap memiliki konsekuensi analitis. Ketika perempuan, anak, lansia, pemuda, atau warga tanpa posisi adat formal hanya tampak sebagai latar, penonton menerima lebih sedikit informasi mengenai agensi, pengetahuan, dan perbedaan kepentingan mereka. Karena itu, kritik artikel ini diarahkan pada efek representasi, bukan pada dugaan niat pembuat film.

Keterbatasan Representasi Pengalaman Berdasarkan Gender

Temuan ketiga, sekaligus yang paling penting bagi artikel ini, adalah bahwa pengalaman masyarakat adat yang dibentuk oleh relasi gender belum sepenuhnya tampil sebagai pusat analisis film. Pesta Babi berhasil memperlihatkan konflik ruang hidup, tetapi narasi utamanya masih bergerak pada level kolektif: masyarakat adat berhadapan dengan negara, korporasi, dan proyek pembangunan. Struktur semacam ini membuat kritik kolonialisme pembangunan terlihat kuat, tetapi pengalaman sehari-hari yang berbeda di dalam komunitas belum selalu tampak secara berlapis.

Dalam perspektif feminis poskolonial, ruang hidup tidak netral gender. Hutan, sagu, air, sungai, kebun, dan kampung dapat memiliki makna berbeda bagi perempuan adat, laki-laki adat, anak, lansia, dan pemimpin adat. Perempuan adat, misalnya, sering berhubungan dengan pangan keluarga, air, kesehatan anak, kerja perawatan, dan pengetahuan ekologis yang diwariskan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak berarti perempuan harus secara esensial disamakan dengan alam atau domestik. Namun, pembagian kerja sosial membuat perubahan ruang hidup dapat menghasilkan beban yang berbeda bagi tubuh dan kerja perempuan. Penelitian dekolonial mengenai komunitas adat juga menunjukkan bahwa relasi terhadap tanah, kepemimpinan keluarga, pengetahuan, dan adaptasi ekologis tidak dapat dilepaskan dari dinamika gender (Datta & Kibria, 2025; Chapola et al., 2025).

Laki-laki adat juga tidak dapat dibaca secara tunggal. Dalam dokumenter advokasi, laki-laki sering tampil sebagai pemimpin adat, pembicara publik, penjaga tanah, atau simbol perlawanan. Representasi ini penting, tetapi dapat membuat pengalaman maskulinitas yang lebih beragam menjadi tidak terlihat. Pemuda adat yang mencari pekerjaan, laki-laki yang bekerja sebagai buruh proyek, warga yang berada dalam posisi ambivalen, atau orang yang kehilangan otoritas sosial akibat perubahan ekonomi dapat memiliki pengalaman yang berbeda. Dengan demikian, gender tidak hanya berarti perempuan. Gender adalah cara membaca bagaimana peran sosial, otoritas, tubuh, kerja, dan pengalaman politik dibentuk secara berbeda.

Anak dan lansia juga perlu dipahami melalui perbedaan pengalaman berdasarkan gender dan generasi. Kehilangan hutan bukan hanya kehilangan tutupan pohon. Bagi anak, ia dapat berarti hilangnya ruang belajar ekologis, bahasa lokal, dan memori tentang cara hidup. Bagi lansia, ia dapat berarti hilangnya tempat penyimpanan sejarah, ritual, dan pengetahuan adat.

Jika film hanya menampilkan mereka sebagai simbol kerentanan tanpa memperlihatkan pengalaman dan pengetahuan mereka, advokasi tetap berisiko memakai tubuh rentan sebagai penguat emosi penonton.

Dengan demikian, *Pesta Babi* dapat dibaca sebagai film yang kuat dalam kritik kolonialisme pembangunan, tetapi belum sepenuhnya kuat dalam memperlihatkan kolonialisme sebagai pengalaman yang bekerja melalui tubuh dan kerja sehari-hari. Kolonialisme pembangunan tidak hanya terjadi ketika tanah diambil atau hutan dibuka. Ia juga terjadi ketika perempuan harus mencari pangan lebih jauh, ketika keluarga kehilangan sumber air, ketika pengetahuan sagu tidak lagi diwariskan, ketika anak kehilangan ruang bermain dan belajar, dan ketika tubuh masyarakat adat menanggung beban dari keputusan ekonomi politik yang dibuat jauh dari kampung mereka. Di titik inilah feminisme poskolonial memperdalam pembacaan film.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Analisis Film

Temuan	Bentuk representasi dalam film	Kekuatan advokasi	Catatan feminis poskolonial
Kritik kolonialisme pembangunan	Pembangunan pangan dan energi dikaitkan dengan tanah adat, deforestasi, dan perubahan ruang hidup	Membalik sudut pandang pembangunan dari negara ke masyarakat adat	Perlu memperlihatkan bagaimana kolonialisme bekerja dalam kehidupan sehari-hari
Masyarakat adat sebagai subjek kolektif	Warga dan tokoh adat dihadirkan sebagai pemilik tanah, memori, dan pengetahuan ekologis	Menguatkan klaim hak adat dan keamanan manusia	Risiko homogenisasi suara, otoritas, dan pengalaman internal komunitas
Keterbatasan representasi pengalaman berdasarkan gender	Narasi utama lebih banyak bergerak pada konflik tanah dan aktor kolektif	Membuka isu hak masyarakat adat ke ruang public	Perempuan, anak, lansia, dan warga non-elite perlu lebih terlihat sebagai subjek politik

Sumber: Hasil analisis penulis terhadap struktur narasi dan representasi visual film.

Film Dokumenter dan Politik Representasi dalam Hubungan Internasional

Pembacaan terhadap *Pesta Babi* perlu dimulai dari pemahaman bahwa dokumenter tidak pernah netral. Film mengorganisasi dunia historis melalui pemilihan adegan, posisi kamera, suara, ritme, dan penyuntingan. Dalam kajian visual HI, pengamatan yang dekat terhadap apa yang benar-benar tampak penting agar peneliti tidak terburu-buru menempatkan gambar hanya

sebagai simbol dari teori yang sudah ditentukan (Austin & Bramsen, 2024). Pada saat yang sama, praktik pembuatan film selalu mengandung keputusan epistemik tentang siapa yang merekam, siapa yang direkam, dan pengetahuan apa yang dapat diedarkan (Jauhola & Kunz, 2026). Dengan kata lain, Pesta Babi tidak hanya menunjukkan fakta, tetapi mengorganisasi fakta menjadi argumen bahwa pembangunan di Papua Selatan memiliki watak kolonial.

Visual politics menunjukkan bahwa gambar dan film dapat membentuk cara publik memahami politik dunia. Makna visual tidak muncul dengan sendirinya, melainkan melalui hubungan antara bentuk, konteks, narasi, dan praktik sirkulasi. Kajian terbaru menunjukkan bahwa film dapat menjadi perangkat strategis untuk membangun sejarah politik, identitas, dan legitimasi, sehingga analisis harus memperhatikan hubungan antara estetika dan kekuasaan (Hintz & Draege, 2025). Perspektif antikolonial juga mengingatkan bahwa estetika bukan hanya representasi politik, tetapi dapat menjadi praktik penolakan epistemik terhadap cara pandang dominan (Wong, 2026). Dengan kerangka ini, Pesta Babi dipahami sebagai teks yang membentuk pengetahuan tentang Papua Selatan, bukan sekadar laporan audiovisual tentang konflik.

Kekuatan visual film terletak pada kemampuannya menghadirkan emosi politik. Gambar hutan, kampung, wajah warga, alat berat, dan narasi kehilangan ruang hidup dapat menciptakan kedekatan antara penonton dan isu Papua Selatan. Dalam advokasi, kedekatan emosional semacam ini penting karena data kebijakan atau statistik sering gagal memperlihatkan penderitaan sosial. Namun, dalam analisis akademik, emosi politik perlu dibaca bersama pertanyaan representasi. Siapa yang membuat penonton merasa? Tubuh siapa yang dipakai untuk membangun emosi? Apakah penonton diajak memahami kompleksitas pengalaman masyarakat adat, atau terutama diajak melihat mereka sebagai korban pembangunan?

Di sinilah artikel ini menempatkan kritiknya. Kritik terhadap Pesta Babi bukan berarti menolak nilai advokasinya. Film advokasi memang tidak wajib menjadi laporan penelitian akademik. Namun, ketika film masuk ke ruang diskusi publik, kampus, jaringan masyarakat sipil, dan debat kebijakan, film menjadi rujukan politik. Sebagai rujukan politik, ia perlu dibaca secara kritis agar tidak menghasilkan narasi tunggal. Narasi tunggal dapat memudahkan mobilisasi solidaritas, tetapi juga dapat menghilangkan keragaman pengalaman lokal.

Bagi HI kritis, isu representasi bukan soal estetika semata. Representasi menentukan siapa yang dianggap sebagai subjek politik yang sah. Dalam wacana pembangunan, masyarakat adat sering digambarkan sebagai penghambat kemajuan atau sebagai korban yang perlu diselamatkan. Pesta Babi menolak representasi pertama dengan menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang berhak atas tanah dan masa depannya. Namun, film masih perlu diuji terhadap representasi kedua: apakah masyarakat adat hanya tampil sebagai korban kolektif, atau sebagai subjek yang memiliki suara, perbedaan, strategi, dan agensi yang beragam?

Feminisme Poskolonial dan Pertanyaan tentang Siapa yang Berbicara

Feminisme poskolonial menawarkan cara membaca yang lebih tajam terhadap representasi masyarakat adat. Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap feminisme arus utama dan teori hubungan internasional yang terlalu lama menjadikan pengalaman Barat, negara kuat, elite, dan laki-laki sebagai ukuran universal. Dalam konteks Pesta Babi, feminisme poskolonial tidak hanya bertanya apakah film membela masyarakat adat, tetapi bagaimana masyarakat adat dibentuk sebagai subjek representasi. Pertanyaan ini penting karena advokasi dapat membela kelompok terpinggirkan sekaligus menyederhanakan mereka.

Spivak (1988) melalui pertanyaan *Can the Subaltern Speak?* mengingatkan bahwa suara kelompok tertindas sering kali tidak hadir secara langsung, melainkan melalui perantara yang memiliki kuasa epistemik. Dalam film dokumenter, perantara itu dapat berupa kamera, penyuntingan, narasi, pilihan tokoh, dan struktur cerita. Masyarakat adat dapat berbicara di dalam film, tetapi suara mereka tetap berada dalam kerangka narasi yang dibuat oleh pembuat film. Karena itu, analisis feminis poskolonial tidak cukup puas dengan keberadaan testimoni. Analisis perlu membaca siapa yang dipilih untuk berbicara, bagaimana ucapannya ditempatkan, dan suara siapa yang tidak masuk dalam narasi final.

Pembacaan Aji (2026) memperkuat argumen bahwa masyarakat adat dalam Pesta Babi ditempatkan sebagai subaltern ketika suara penolakan mereka tidak memperoleh ruang politik yang setara dalam relasi dengan negara, kapital, dan oligarki. Kajian itu menegaskan bahwa tanah merupakan ruang eksistensial yang menyatu dengan identitas, sejarah, dan kelangsungan hidup. Artikel ini melanjutkan pembacaan tersebut, tetapi menggeser fokus dari subalternitas dalam struktur kekuasaan menuju mediasi suara di dalam film. Testimoni masyarakat adat

memang hadir, tetapi kamera, penyuntingan, penerjemahan, dan pemilihan tokoh tetap menentukan suara mana yang memperoleh otoritas dan konteks. Karena itu, kehadiran suara tidak otomatis menghapus persoalan representasi. Pertanyaan analitisnya bukan hanya apakah masyarakat adat dapat berbicara, melainkan juga bagaimana ucapan mereka disusun menjadi narasi publik dan pengalaman siapa yang tidak masuk ke dalam hasil akhir.

Dalam kerangka feminis Hubungan Internasional, gender bukan sinonim dari perempuan. Gender adalah kategori analisis yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui pembagian kerja, tubuh, otoritas, ruang publik, ruang domestik, dan produksi pengetahuan. Prügl dan Tickner (2018) menegaskan bahwa agenda feminis HI perlu terus menghubungkan keamanan, ekonomi politik, tubuh, dan produksi pengetahuan agar pengalaman sehari-hari tidak dikeluarkan dari analisis politik global. Dari sini, *Pesta Babi* perlu dibaca bukan hanya melalui konflik tanah dan negara, tetapi juga melalui pertanyaan tentang pangan, air, tubuh, keluarga, kerja perawatan, dan pengetahuan ekologis lokal.

Pertanyaan feminis yang perlu diajukan kepada film adalah: apakah perempuan adat hadir sebagai subjek yang menafsirkan pembangunan, atau hanya sebagai latar penderitaan? Apakah anak dan lansia diberi ruang sebagai pemilik pengalaman, atau hanya sebagai simbol masa depan yang terancam? Apakah laki-laki adat hanya tampil sebagai pemimpin dan penjaga tanah, atau juga sebagai subjek yang mengalami perubahan kerja, otoritas, dan relasi keluarga? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menggeser isu tanah adat. Justru pertanyaan tersebut memperdalam pemahaman bahwa tanah adat adalah ruang hidup yang mengandung relasi gender dan generasi.

Dengan demikian, feminisme poskolonial membuat kritik terhadap kolonialisme pembangunan menjadi lebih kompleks. Kolonialisme tidak hanya hadir dalam kebijakan negara, konsesi korporasi, atau pembukaan hutan. Kolonialisme juga hadir dalam cara pengalaman lokal diterjemahkan menjadi cerita publik. Jika cerita publik hanya menampilkan masyarakat adat sebagai korban tunggal, maka kritik terhadap kolonialisme masih menyimpan bentuk penghapusan lain. Penghapusan itu terjadi ketika pengalaman perempuan, anak, lansia, dan warga non-elite tidak tampak sebagai bagian dari politik.

Keamanan Manusia, Pangan, Energi, dan Tubuh yang Menanggung Pembangunan

Konteks Hubungan Internasional dalam artikel ini juga tampak melalui konsep keamanan manusia. Isu yang ditampilkan Pesta Babi tidak hanya berkaitan dengan konflik agraria atau kerusakan lingkungan, tetapi juga dengan keamanan hidup. Hilangnya tanah, hutan, air, dan sumber pangan dapat dibaca sebagai ancaman terhadap keberlanjutan masyarakat adat. Dalam pendekatan keamanan manusia, ancaman tidak harus berbentuk perang antarnegara. Ancaman dapat hadir melalui kebijakan pembangunan yang mengubah kemampuan komunitas untuk bertahan hidup.

Keamanan manusia tidak boleh dipahami sebagai konsep yang netral gender. Rindrasari (2026) menunjukkan bahwa perampasan ruang hidup dalam Pesta Babi dapat dibaca melalui hilangnya sumber pangan, meningkatnya beban perempuan, gangguan air dan kesehatan anak, serta terputusnya pewarisan pengetahuan ekologis. Pembacaan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa perubahan bentang alam juga mengubah kerja perawatan, pola konsumsi, hubungan keluarga, dan kemampuan komunitas mempertahankan kehidupan. Artikel ini menambahkan pertanyaan representasional: apakah perempuan dan anak hanya hadir sebagai bukti visual penderitaan, atau memperoleh ruang untuk menjelaskan pengetahuan, kepentingan, dan strategi bertahan hidup mereka sendiri? Ketika hutan sagu hilang atau sumber air terganggu, dampaknya dapat berbeda bagi perempuan, laki-laki, anak, dan lansia karena pembagian kerja serta otoritas di dalam komunitas. Inilah yang dimaksud dengan keamanan manusia yang dibentuk oleh relasi gender. Temuan mengenai pergeseran sumber air setelah ekspansi perkebunan di Papua memperlihatkan bahwa perubahan ekologis dapat menjadi persoalan kesehatan dan ketimpangan akses rumah tangga (Asmara & Randhir, 2025).

Ekonomi politik pangan dan energi memperkuat dimensi HI dalam artikel ini. Food estate, gula, bioetanol, dan biomassa merupakan bagian dari agenda negara untuk menjawab isu pangan dan energi, tetapi agenda tersebut berhadapan dengan hak ulayat dan sistem pangan lokal. Studi mengenai MIFEE dan food estate menunjukkan risiko perampasan tanah, perpindahan, pelanggaran hak, dan melemahnya kedaulatan pangan apabila kebijakan dijalankan tanpa partisipasi bermakna (Astuti & McGregor, 2017; Tohari, 2018; Thontowi et al., 2023; Yuwono, 2024). Kajian tentang konflik perubahan penggunaan lahan dan

nasionalisme sumber daya menunjukkan bahwa konflik lokal berkaitan dengan lemahnya perlindungan hak adat, relasi negara– korporasi, investasi asing, dan strategi perlawanan komunitas (Afrizal & Berenschot, 2022; Kadir & Murray, 2019). Karena itu, kepentingan nasional tidak dapat diasumsikan otomatis identik dengan keamanan komunitas yang wilayahnya menjadi lokasi proyek.

Pesta Babi berada dalam sejarah wacana pembangunan tersebut. Film menampilkan bahwa proyek kontemporer di Papua Selatan bukan peristiwa yang terputus dari sejarah panjang pengelolaan tanah dan sumber daya. Namun, artikel ini menambahkan bahwa sejarah pembangunan tersebut perlu dibaca melalui tubuh yang menanggung dampaknya. Dalam banyak analisis ekonomi politik, tubuh sering hilang karena fokus diarahkan pada negara, modal, pasar, dan kebijakan. Feminisme poskolonial mengembalikan tubuh ke pusat analisis: tubuh yang bekerja, tubuh yang lapar, tubuh yang merawat, tubuh yang kehilangan air, dan tubuh yang dipaksa menyesuaikan diri dengan perubahan ekologis.

Dengan cara ini, kritik terhadap kolonialisme pembangunan menjadi lebih tajam. Kolonialisme pembangunan bukan hanya persoalan tanah yang dialihkan dari masyarakat adat kepada proyek. Ia juga persoalan kehidupan sehari-hari yang menjadi lebih rentan karena keputusan politik ekonomi. Bila Pesta Babi ingin dipahami sebagai kritik kolonialisme, maka pembacaan feminis poskolonial mendorong kita untuk melihat kolonialisme sebagai proses yang masuk ke ruang domestik, dapur, tubuh, kebun, sungai, hutan sagu, dan relasi antar generasi.

Kritik sebagai Penguatan Advokasi Masyarakat Adat

Salah satu risiko dalam membaca film advokasi adalah anggapan bahwa kritik terhadap representasi berarti melemahkan perjuangan yang dibawa film. Artikel ini mengambil posisi sebaliknya. Kritik feminis poskolonial justru diperlukan agar advokasi masyarakat adat tidak jatuh pada penyederhanaan. Advokasi yang kuat bukan hanya advokasi yang mampu membangkitkan emosi publik, tetapi juga advokasi yang mampu memperlihatkan kerumitan subjek yang dibela. Masyarakat adat bukan kategori moral yang tunggal. Mereka adalah komunitas dengan sejarah, relasi gender, generasi, marga, otoritas, perbedaan kepentingan, dan strategi bertahan hidup yang beragam.

Pesta Babi membuka isu Papua Selatan ke ruang publik melalui pemutaran komunitas, diskusi, dan sirkulasi digital. Dalam konteks ini, dokumenter bergerak sebagai bagian dari advokasi yang menghubungkan pengalaman lokal dengan bahasa hak masyarakat adat, keadilan lingkungan, dan keamanan manusia. Sirkulasi semacam itu memperbesar daya politik film, tetapi juga memperbesar tanggung jawab representasionalnya karena narasi yang ringkas dapat menjadi rujukan utama bagi penonton yang tidak memiliki akses langsung terhadap konteks Papua Selatan (Laksono & Dale, 2026).

Akan tetapi, semakin luas jangkauan advokasi, semakin besar pula risiko narasi tunggal. Papua Selatan dapat dipahami hanya sebagai ruang penderitaan. Negara dapat dipahami hanya sebagai pelaku penindasan. Korporasi dapat dipahami hanya sebagai perusak. Masyarakat adat dapat dipahami hanya sebagai korban. Masing-masing representasi tersebut memiliki dasar dalam pengalaman konflik, tetapi tetap perlu dibatasi agar tidak menutup kemungkinan membaca variasi sosial dan politik. Dalam studi HI, narasi tunggal dapat memengaruhi cara isu domestik dibaca oleh publik global. Karena itu, akurasi representasi merupakan bagian dari tanggung jawab politik advokasi.

Kritik feminis poskolonial menawarkan cara menjaga keseimbangan antara keberpihakan dan ketelitian. Keberpihakan penting karena isu masyarakat adat tidak dapat dibaca secara netral seolah tidak ada ketimpangan kuasa. Namun, ketelitian juga penting agar keberpihakan tidak berubah menjadi romantisasi. Masyarakat adat tidak perlu dibuat homogen untuk dibela. Justru pembelaan yang lebih kuat adalah pembelaan yang mengakui perbedaan suara dan pengalaman di dalam komunitas. Dengan demikian, kritik terhadap representasi bukanlah kritik terhadap masyarakat adat, melainkan kritik terhadap cara publik, akademisi, dan pembuat film memproduksi pengetahuan tentang mereka.

Implikasi teoritisnya adalah perlunya memperluas kajian HI kritis terhadap dokumenter advokasi. Politik global tidak hanya hadir dalam perjanjian atau konflik antarnegara, tetapi juga dalam representasi visual tentang tanah, hutan, pangan, dan masyarakat adat. Ketika beredar secara digital, film dapat membentuk solidaritas dan pengetahuan publik lintas batas. Karena itu, kajian HI perlu menilai pesan film sekaligus relasi etis antara pembuat film, subjek yang direkam, dan penonton.

Implikasi praktisnya adalah perlunya dokumenter advokasi memberi ruang lebih besar pada keragaman pengalaman yang dibentuk oleh relasi gender. Film tentang masyarakat adat sebaiknya tidak hanya menampilkan pemimpin adat atau konflik tanah yang terlihat di ruang publik, tetapi juga kerja perawatan, pengetahuan pangan, pengalaman anak, lansia, pemuda, dan perempuan adat sebagai subjek politik. Dengan demikian, kolonialisme pembangunan tidak hanya dilihat sebagai konflik struktural antara negara, korporasi, dan komunitas, tetapi juga sebagai proses yang mengubah kehidupan sehari-hari.

Ruang Hidup yang Berdimensi Gender sebagai Medan Politik Global

Konsep ruang hidup yang berdimensi gender menghubungkan politik visual, keamanan manusia, dan ekonomi politik pembangunan. Pesta Babi memperlihatkan kehilangan tanah dan hutan; pembacaan feminis poskolonial memperinci kehilangan itu sebagai menyusutnya akses pangan dan air, bertambahnya kerja perawatan, berubahnya relasi antargenerasi, serta melemahnya memori ekologis. Dengan demikian, dampak pembangunan tidak berhenti pada perubahan bentang alam, tetapi masuk ke dalam tubuh dan rutinitas sehari-hari.

Konsep tersebut juga memperjelas relevansi Papua Selatan bagi HI. Ketika negara mendefinisikan keamanan pangan melalui produksi beras, gula, atau bioetanol, masyarakat adat dapat mendefinisikannya melalui sagu, hutan, air, dan otonomi pangan lokal. Keamanan pangan nasional karena itu dapat berjalan bersamaan dengan ketidakamanan lokal jika proyek besar mengubah ruang hidup komunitas.

Ruang hidup tidak dialami secara seragam. Pembagian tugas mengambil air, mengolah pangan, merawat anak, memimpin musyawarah adat, dan bernegosiasi dengan aktor luar menentukan siapa yang menanggung biaya pembangunan dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Karena itu, istilah ruang hidup yang berdimensi gender tidak menyamakan perempuan dengan alam, melainkan menunjukkan bahwa akses, kerja, otoritas, dan kerentanan dibentuk oleh relasi sosial di dalam komunitas.

Dengan demikian, artikel ini menawarkan pembacaan bahwa kritik terhadap kolonialisme pembangunan di Papua Selatan dapat memperkaya teori dan metode HI di Indonesia. Teori HI tidak harus selalu diambil dari pengalaman Eropa, Amerika Serikat, atau konflik antarnegara. Pengalaman masyarakat adat Papua Selatan dapat menjadi pintu masuk untuk memikirkan

ulang keamanan, pembangunan, kedaulatan, dan keadilan global dari pinggiran. Namun, agar pengalaman pinggiran tidak kembali disederhanakan, pembacaan tersebut harus tetap sensitif terhadap gender, generasi, dan posisi sosial di dalam komunitas. Inilah kontribusi utama feminisme poskolonial bagi kajian HI kritis: ia menghubungkan struktur global dengan tubuh dan kehidupan sehari-hari tanpa menghapus keragaman subjek lokal.

Implikasi bagi Studi Hubungan Internasional Indonesia

Implikasi lain terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan HI yang lebih peka terhadap pengalaman pinggiran. Feminisme poskolonial mendorong HI Indonesia untuk tidak hanya membaca negara sebagai aktor utama, tetapi juga memperhatikan masyarakat adat, perempuan, anak, lansia, pekerja informal, komunitas lokal, dan kelompok yang sering tidak memiliki akses terhadap forum kebijakan. Dalam konteks Papua Selatan, pertanyaan HI tidak cukup berhenti pada bagaimana negara mencapai swasembada pangan atau mengelola investasi. Pertanyaan yang sama pentingnya adalah siapa yang menanggung biaya sosial-ekologis dari agenda tersebut, siapa yang kehilangan ruang hidup, dan siapa yang tidak masuk dalam bahasa resmi kebijakan.

Dengan menempatkan film dokumenter sebagai teks visual-politik, artikel ini juga memperluas sumber data dalam kajian HI. Data HI tidak hanya berupa dokumen diplomatik, perjanjian internasional, pidato pejabat, laporan lembaga internasional, atau data perdagangan. Film, foto, poster advokasi, media sosial, dan testimoni visual juga dapat menjadi arsip politik yang penting. Dalam kasus Pesta Babi, film bekerja sebagai medium yang mempertemukan pengalaman lokal Papua Selatan dengan publik nasional dan transnasional. Melalui distribusi digital dan diskusi publik, film dapat membentuk solidaritas, penolakan, dukungan, atau kontroversi politik. Karena itu, film tidak hanya menjadi objek budaya, tetapi bagian dari sirkulasi pengetahuan politik internasional.

Pembacaan terhadap Pesta Babi juga memiliki implikasi bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di Indonesia. Selama ini, kajian HI di Indonesia sering kali masih lebih mudah dikenali melalui isu kebijakan luar negeri, diplomasi, organisasi internasional, ekonomi politik global, atau keamanan regional. Isu Papua Selatan kerap diposisikan sebagai persoalan domestik, sehingga tidak selalu dianggap sebagai objek utama kajian HI. Artikel ini

menunjukkan bahwa batas antara domestik dan internasional tidak dapat dipahami secara kaku. Pangan, energi, deforestasi, hak masyarakat adat, investasi, dan advokasi digital merupakan isu yang bergerak melampaui batas negara, meskipun lokasinya berada dalam wilayah nasional.

Bagi pengembangan kajian HI Indonesia, temuan artikel ini menunjukkan tiga konsekuensi. Pertama, isu yang berlokasi di dalam batas negara tetap dapat menjadi objek HI ketika dibentuk oleh wacana keamanan pangan, investasi, norma hak masyarakat adat, dan jaringan advokasi lintas batas. Kedua, film dokumenter dapat digunakan sebagai data politik selama peneliti membedakan isi visual, konstruksi naratif, dan klaim empiris tentang dunia di luar film. Ketiga, pendekatan feminis poskolonial mencegah kajian kritis mengganti negara-sentrisme dengan romantisasi komunitas. Ia menuntut analisis yang sekaligus berpihak pada hak masyarakat adat dan terbuka terhadap perbedaan gender, generasi, kelas, marga, serta posisi dalam struktur adat.

D. Simpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan dokumenter advokasi yang penting karena menghadirkan kritik terhadap kolonialisme pembangunan di Papua Selatan. Film ini memperlihatkan bahwa proyek pangan, energi, deforestasi, dan investasi tidak dapat dipahami hanya sebagai agenda ekonomi nasional. Proyek-proyek tersebut berkaitan dengan ruang hidup masyarakat adat, keamanan manusia, hak atas tanah, identitas, dan keberlanjutan ekologis. Dalam konteks Hubungan Internasional, film ini relevan karena menghubungkan isu lokal Papua Selatan dengan ekonomi politik pangan-energi, politik lingkungan, hak masyarakat adat, dan visual politics.

Namun, melalui perspektif feminis poskolonial Hubungan Internasional, artikel ini juga menemukan bahwa representasi masyarakat adat dalam film masih cenderung bergerak sebagai subjek kolektif yang relatif homogen. Film berhasil memperlihatkan masyarakat adat sebagai pihak yang terdampak dan melawan kolonialisme pembangunan. Akan tetapi, pengalaman yang dibentuk oleh relasi gender di dalam komunitas belum sepenuhnya menjadi pusat narasi. Perempuan adat, laki-laki adat, anak, lansia, pemuda, dan warga non-elite tidak selalu mengalami pembangunan dengan cara yang sama. Kehilangan hutan, tanah, air, dan pangan

bukan hanya kehilangan ekologis, melainkan juga kehilangan yang bekerja melalui tubuh, kerja perawatan, keluarga, memori, dan pengetahuan lokal.

Temuan ini melanjutkan pembacaan subaltern Aji (2026) dan pembacaan keadilan gender Rindrasari (2026), tetapi menegaskan bahwa marginalisasi juga perlu diperiksa pada tingkat representasi. Kritik feminis poskolonial tidak melemahkan advokasi Pesta Babi, melainkan memperkuatnya. Advokasi masyarakat adat akan lebih kokoh apabila tidak menyederhanakan masyarakat adat sebagai kategori tunggal. Pembelaan terhadap masyarakat adat perlu disertai pembacaan yang sensitif terhadap suara yang hadir dan tidak hadir, otoritas representasi, pengalaman yang dibentuk oleh relasi gender, serta relasi kuasa dalam produksi pengetahuan visual. Dengan demikian, film dokumenter dapat menjadi media advokasi yang tidak hanya kuat secara moral, tetapi juga tajam secara analitis.

Artikel ini terbatas pada analisis representasi film dan tidak melakukan penelitian lapangan terhadap komunitas adat Papua Selatan. Oleh karena itu, kesimpulan tidak dimaksudkan untuk menggantikan suara empirik masyarakat yang terdampak. Penelitian lanjutan perlu mengembangkan studi resepsi penonton, etnografi mengenai pengalaman yang dibentuk oleh relasi gender dalam proyek pangan dan energi, serta perbandingan antardokumenter advokasi. Bagi pembuat film dan jaringan advokasi, temuan ini menyarankan pelibatan yang lebih sistematis terhadap perempuan, pemuda, anak, lansia, dan warga non-elite sejak riset, pengambilan gambar, penyuntingan, hingga diskusi setelah pemutaran.

Daftar Pustaka

- Afrizal, & Berenschot, W. (2022). Land-use change conflicts and anti-corporate activism in Indonesia: A review essay. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 333–356. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.12>
- Aji, W. T. (2026). Pesta Babi dan para babi istana [Manuskrip daring]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/404942138_Pesta_Babi_dan_Para_Babi_Istana
- Asmara, B., & Randhir, T. O. (2025). A mixed-methods assessment of the influence of palm plantations on water resources of Indigenous communities of Indonesian Papua. *Global Environmental Change Advances*, 5, 100018. <https://doi.org/10.1016/j.gecadv.2025.100018>
- Astuti, R., & McGregor, A. (2017). Indigenous land claims or green grabs? Inclusions and exclusions within forest carbon politics in Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 44(2), 445–466. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1197908>

- Austin, J. L., & Bramsen, I. (2024). Visual (data) observation in International Relations: Attentiveness, close description, and the politics of seeing differently. *Review of International Studies*, 50(6), 965–986. <https://doi.org/10.1017/S0260210523000426>
- Chapola, J., Datta, R., Starlight, T., Hurlbert, M., & Poggendorf, S. (2025). Indigenous women-led climate crisis solutions from decolonial feminist perspectives in Western Canada. *Environmental Science & Policy*, 174, 104272. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104272>
- Cisneros, E., Kis-Katos, K., & Nuryartono, N. (2021). Palm oil and the politics of deforestation in Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Management*, 108, 102453. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102453>
- Datta, R., & Kibria, A. (2025). Indigenous women-led climate crisis solutions: A decolonial perspective from the Garo Indigenous community in Bangladesh. *Political Geography*, 117, 103258. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103258>
- Ekawati, S., Subarudi, Budiningsih, K., Sari, G. K., & Muttaqin, M. Z. (2019). Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). *Forest Policy and Economics*, 108, 101939. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Harada, K., Habib, M., Sakata, Y., & Maryudi, A. (2022). The role of NGOs in recognition and sustainable maintenance of customary forests within Indigenous communities: The case of Kerinci, Indonesia. *Land Use Policy*, 113, 105865. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105865>
- Hintz, L., & Draege, J. B. (2025). Film-making the nation great again: Audio-visualizing history in the authoritarian toolkit. *Perspectives on Politics*, 1–33. <https://doi.org/10.1017/S1537592725102326>
- Jauhola, M., & Kunz, R. (2026). Staying with the trouble: Film-making and the politics of knowledge production in the IR classroom and beyond. *Review of International Studies*, 1–20. <https://doi.org/10.1017/S0260210525101666>
- Kadir, M. Y. A., & Murray, A. (2019). Resource nationalism in the law and policies of Indonesia: A contest of state, foreign investors, and Indigenous peoples. *Asian Journal of International Law*, 9(2), 298–333. <https://doi.org/10.1017/S204425131900002X>
- Laksono, D. D., & Dale, C. P. (Directors). (2026). *Pesta Babi: Kolonialisme di zaman kita* [Film dokumenter]. Watchdoc Documentary dan jaringan kolaborator.
- Parsch, C., Wagner, B., Pangau-Adam, M., Nitschke, C., Kreft, H., & Schrader, J. (2022). Papua at the crossroads: A plea for systematic conservation planning in one of the largest remaining areas of tropical rainforest. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5, 763131. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.763131>
- Prügl, E., & Tickner, J. A. (2018). Feminist International Relations: Some research agendas for a world in transition. *European Journal of Politics and Gender*, 1(1–2), 75–91. <https://doi.org/10.1332/251510818X15272520831193>
- Republik Indonesia. (2024). Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

- Rindrasari. (2026, May 25). Perampasan ruang perempuan di tanah adat: Membaca Pesta Babi dari kacamata keadilan gender. Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia. <https://ykpindonesia.org/id/perampasan-ruang-perempuan-di-tanah-adat-membaca-pesta-babi-dari-kacamata-keadilan-gender/>
- Sloan, S., Campbell, M. J., Alamgir, M., Engert, J., Ishida, F. Y., Senn, N., Huther, J., & Laurance, W. F. (2019). Hidden challenges for conservation and development along the Trans-Papuan economic corridor. *Environmental Science & Policy*, 92, 98–106. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.11.011>
- Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
- Sefriani, Thontowi, J., & Wartini, S. (2023). Effectuating food sovereignty without violating the rights of Indigenous people: A case study of the Merauke Integrated Food and Energy Estate project. *KnE Social Sciences*, 8(9), 616–624. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13376>
- Tohari, A. (2018). Land grabbing dan potensi internal displacement persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 37, 49–62. <https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.151>
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.
- Vlase, I. (2025). Knowledge production on decolonial feminism: Implications for epistemic politics. *Women's Studies International Forum*, 110, 103080. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103080>
- Wong, S. (2026). Towards an anti-colonial aesthetic politics: Surrealist praxis and epistemic refusal. *Review of International Studies*, 52(3), 557–578. <https://doi.org/10.1017/S0260210525100971>
- Yuwono, F. P. (2024). Legal implications of the Merauke Food Estate: A critical analysis of customary rights and environmental concerns. *Lex Publica*, 11(2), 294–316. <https://doi.org/10.58829/lp.11.2.2024.274>